

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa angin segar dalam bidang pendidikan. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) berimplikasi langsung terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana kewenangan dan keleluasaan pengelolaan pendidikan diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten yang salah satu bidang di dalamnya adalah komite sekolah/madrasah.

Komite sekolah adalah konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah, maka perlu dikembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum di mana representasi para stakeholder Sekolah terwakili secara proporsional. Dalam berbagai dokumen yang ada dan consensus yang telah muncul dalam berbagai forum, wadah ini diberi nama komite Sekolah.<sup>1</sup>

Sayangnya, terdapat kecenderungan pada sebagian teoretisi ataupun praktisi pendidikan (khususnya dalam bidang pendidikan formal) untuk memomorduakan manajemen kehumasan. Mereka lebih meyakini bahwa pada saat telah diperoleh manajemen kurikulum yang baik (*qualified*), maka secara otomatis seluruh proses pendidikan di sekolah akan berjalan lancar dan memberikan hasil pendidikan yang optimal.

---

<sup>1</sup>Uno. *Profesi Kependidikan*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm 54

Di satu sisi, anggapan demikian memang tidak sepenuhnya salah, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang berujung pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.<sup>2</sup> Rendahnya kesadaran berpartisipasi tersebut banyak dipengaruhi oleh pemahaman akan makna lembaga pendidikan, terutama di kalangan masyarakat yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah.<sup>3</sup> Namun di sisi lain, sebagaimana yang diingatkan oleh Neagley, sekolah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai agen pembaharuan (*agent of change*) yang hendaknya selalu (berusaha) mengikutsertakan masyarakat agar pekerjaannya dapat menjadi lebih efektif.<sup>4</sup> Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah komite sekolah.

Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

---

<sup>2</sup>Di negara-negara maju, terutama penganut sistem desentralisasi, kesadaran masyarakat sebagai pemilik dan penanggung jawab lembaga pendidikan sangat tinggi. Mereka merasa memiliki sekolah sehingga berpartisipasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol terhadap program-program sekolah. Bahkan mereka bersedia memberikan sumbangan moral dan material untuk kelangsungan hidup lembaga pendidikan terkait karena mereka meyakini bahwa pendidikan adalah modal utama bagi peningkatan kualitas hidup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Lihat Made Pidarta, *Managemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1988), hlm. 198).

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

<sup>4</sup>Neagley, Ross L. and N. Dean Evans. *Hand-Book for Effective Supervision of Instruction*. Third Edition. New Jersey:Prentice Hall, Inc., 1980, hlm. 162.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 93-94

- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan.
  - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan.
  - 4) Kriteria tenaga pendidikan.
  - 5) Kriteria fasilitas pendidikan.
  - 6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Bersandar dari teori di atas berikut ditemukan fakta-fakta berkenaan dengan komite sekolah di MTs Negeri 1 Palembang:

1. Komite Sekolah sudah terbentuk sejak tahun pelajaran 2002/2003. Setelah terbentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan, pengurus dan anggota Komite Sekolah harus menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk mengatur tata laksana pengelolaan Komite Sekolah, termasuk di dalamnya mekanisme pembentukan Komite Sekolah

periode berikutnya. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan pada MTs Negeri 1 Palembang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sudah ada.

2. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Komite Sekolah adalah sosialisasi tentang peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang.
3. Komite Sekolah pada prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka pembuatan Rencana Program Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).
4. Adanya sebagian pendapat dari beberapa orang tua siswa/masyarakat yang beranggapan bahwa fungsi Komite Sekolah tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh BP3 yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.<sup>6</sup>

Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan<sup>7</sup>, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (*output*) terlalu memusatkan pada masukan (*input*) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Yan Hery Darmansyah (Kepala Madrasah), tanggal 16 September 2015

<sup>7</sup> Observasi lapangan di MTs Negeri 1 Palembang, 19 Januari 2016

kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi. *Ketiga*, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peranserta mereka sangat penting di dalam proses-poses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

Dengan demikian, sekolah harus menjalin komunikasi yang transparan dengan masyarakat dan orang tua siswa. Setiap aktivitas pendidikan (terutama) yang bersifat inovatif sudah sepatutnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar mereka, sebagai salah satu penanggungjawab lembaga, dapat lebih mengerti serta memahami akan peran dan fungsinya terhadap aktivitas yang diadakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian ini dengan judul “Peran Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (Studi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)”

---

<sup>8</sup>Kuswara, “*School Based Management (SBM): Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah*”, dalam *Media Pembinaan*, Bandung, Mei 2003, h. 15.

<sup>9</sup>Pidarta, *Managemen Pendidikan Indonesia.....*, hlm. 194.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian awal pada MTs Negeri 1 Palembang diperoleh informasi/data sebagai identifikasi masalah:

1. Komite Sekolah di MTs Negeri 1 Palembang pada prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka pembuatan Rencana Program Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Adanya sebagian pendapat dari beberapa orang tua siswa/masyarakat (MTs Negeri 1 Palembang) yang beranggapan bahwa fungsi Komite Sekolah tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh BP3 yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan demikian, analisis mengenai partisipasi komite perlu dilakukan guna memberikan gambaran empiris komite pada praktis pendidikan. Sehubungan dengan itulah penelitian ini dilakukan di MTs N 1 Palembang.

## **C. Batasan Masalah**

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, mempertimbangkan waktu dan biaya dalam pelaksanaan penelitian, maka penelitian membatasi pada peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang dan untuk lebih rincinya bahwa secara konseptual ada 4 peran komite yakni sebagai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk. Yan Hery Darmansyah (Kepala Sekolah), tanggal 16 September 2015

pendukung (*support agency*), pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini akan difokuskan pada dua permasalahan berikut:

1. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang?
2. Bagaimana dampak peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:

1. Menganalisis peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang;
2. Menganalisis dampak peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan bidang pendidikan yang terkait dengan teori manajemen pendidikan, khususnya manajemen berbasis sekolah (MBS) atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan konseptual Peran Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah).
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang ilmu manajemen pendidikan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah.

2. Praktis

- a. Bagi Kementrian Agama Kota Palembang, untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran komite dilingkungan madrasah khususnya di Kota Palembang.
- b. Bagi Pihak madrasah dan Komite MTs N 1 Palembang, agar dapat dijadikan masukan bagi lembaga guna menguatkan perannya secara komprehensif.

## **G. Kajian Pustaka**

Sepanjang penelusuran, ditemukan beberapa kajian tentang hal tersebut, antara lain:

*Pertama*, M Ali Mustaqin (2014) dengan judul Tesis "*Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Gisting Tanggamus*". Dalam penelitiannya saudara M. Ali Mustaqim mengungkapkan teori-toeri yang berkenaan dengan peran komite. Metode yang



digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini: komite memiliki andil dalam kesuksesan proses pendidikan di sekolah. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan komite maka akan baik pula proses pendidikan yang dilaksanakan. Persamaan tesis di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama-sama menjadikan komite sekolah sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek meningkatkan mutu sedangkan penelitian ini tentang pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

*Kedua*, Dede Suhendar (2014) dengan judul Tesis “*Komite Sekolah dan Perannya Pada Pelaksanaan Pendidikan di SMA 1 Kota Bekasi*”. Penelitian Dede Suhendar mengungkap teori-teori pada komite sekolah serta perannya pada pelaksanaan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya peran yang signifikan dirasakan dari komite Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada dijadikannya komite sekolah sebagai objek penelitian. Perbedaannya ada pada aspek yang menjadi penekanan dalam penelitian, jika penelitian saudara Dede Suhendar beracuan pada pelaksanaan pendidikan sedangkan penelitian penulis menekankan aspek penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang.

*Ketiga*, Eko Sasongko (2014) dengan judul Tesis “*Implementasi Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jambi*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa komite sekolah memiliki

peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di MAN 1 Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti komite sekolah. Sedangkan perbedaannya penelitian saudara Eko Sasongko mengambil semua aspek yang ada dalam Manajemen Berbasis Sekolah sedangkan penelitian penulis pada aspek komite sekolah saja jadi penelitian yang penulis lakukan hanya berpusat pada satu aspek dari Manajemen Berbasis Sekolah saja.

*Keempat*, Adil Abdullah (2014) dengan judul Tesis “ Analisis Pelaksanaan Fungsi-fungsi Komite Sekolah di MTs 1 Tanjung Pinang”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa komite sekolah jika melaksanakan fungsi dengan baik maka akan sangat membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. Meski sama-sama menjadikan komite sekolah sebagai objek utama penelitian namun juga ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian ini pada pelaksanaan fungsi-fungsi komite sekolah sedangkan penelitian penulis pada peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs 1 Palembang.

*Kelima*, Gapriadi (2014) dengan judul Tesis “Kontribusi Komite Sekolah terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Hasil penelitian di atas adalah ada kontribusi signifikan yang diberikan oleh komite sekolah pada implementasi manajemen berbasis sekolah di SMAN 1 Kayu Agung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti komite sekolah. Sedangkan perbedaannya terletak pada

konsentrasi penelitian, saudara Gapriadi mengambil semua aspek yang ada dalam manajemen berbasis sekolah sedangkan penulis meneliti pada aspek peran komite pada penyelenggaraan pendidikan saja.

## **H. Kerangka Teoritis**

### **1. Pengertian Komite Sekolah**

Komite sekolah adalah konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah, maka perlu dikembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum di mana representasi para *stake holder* Sekolah terwakili secara proporsional. Dalam berbagai dokumen yang ada dan consensus yang telah muncul dalam berbagai forum, wadah ini di beri nama komite Sekolah.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah. Untuk penamaan badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti

---

<sup>11</sup>Uno. *Profesi Kependidikan*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm 54

komite Sekolah, majelis madrasah , komite TK, atau nama-nama lain yang di sepakati bersama.<sup>12</sup>

Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang di kelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan orang lain. Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dinas pendidikan wilayahnya dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.<sup>13</sup>

## **2. Peran Komite Sekolah**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak di berdayakan.

Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 54 dikemukakan:

---

<sup>12</sup>Hasbullah. *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT.Grafindo, 2006), hlm 90

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 90

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

### **3. Fungsi Komite Sekolah**

Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
  - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
  - 4) Kriteria tenaga pendidikan;

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 93-94

- 5) Kriteria fasilitas pendidikan;
  - 6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan data yang memberikan gambaran dan melukiskan realita sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 6.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Sementara itu Margono yang dikutip Zuriah mengemukakan bahwa fungsi penelitian pendidikan khususnya dan sosial pada umumnya adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan kait-mengait, demi kemajuan dan eksistensi manusia itu sendiri. Metode ini dipilih dikarenakan sejalan dengan tujuan untuk mengungkap lingkup permasalahan di atas.<sup>17</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan Jenis data dalam kajian ini adalah keterangan berupa kata-kata maupun cerita dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan foto.<sup>18</sup>

Sumber Data Primer yaitu kepala sekolah, komite sekolah, wakil Ketua, sekretaris, bendahara, anggota komite, staf TU, guru MTs N 1 Palembang dan arsip-arsip penting untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 21.

<sup>17</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikaasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 21

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hlm. 107

**Tabel 1**  
**Rincian Narasumber Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Komite/ H Sanan	1
2	Wakil Ketua/ Mustar Refli	1
3	Sekretaris/Okorisman	1
4	Bendahara/ Rismalakusuma	1
5	Wakil Bendahara/Rismawati Nafiz	1
6	Anggota Komite/ Zainal Abidin,	1
7	Kepala Madrasah/ Yan Hery Darmansyah	1
8	Guru/ Berina Jusanti, Usman Saleh	2
<b>Total</b>		<b>9</b>

Sumber data sekunder yaitu sumber yang dijadikan untuk sumber data pendukung sebagai pelengkap data yang didapatkan dari data primer. Sistem ini agar ditemukan data-data yang teruji dan terhindar dari bias penelitian. Sumber data sekunder semua data tertulis dari jurnal, artikel, kamus, surat kabar, dokumen dan data lain dalam melengkapi kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain :

- a. Teknik *interview*/ wawancara secara garis besar terdiri dari 2 macam :
  - 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai pengontrol jawaban dari narasumber. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.



2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai.

Dari kedua jenis wawancara di atas penelitian ini menggunakan keduanya guna mendapatkan data tentang: pelibatan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang, peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang. Sedangkan narasumber yang di wawancara adalah Ketua Komite, Wakil Ketua Komite, Sekertaris Komite, anggota komite dan Kepala Sekolah dan guru MTs N 1 Palembang.

b. Teknik observasi yaitu untuk mengamati langsung serta mencatat secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. mempunyai banyak macamnya. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang macam-macam observasi simak penjelasan berikut.

**1) Observasi Partisipatif.** Adalah peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data. Artinya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Melalui observasi partisipatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku atau

gejala yang muncul. Observasi partisipatif dapat digolongkan menjadi empat yaitu: partisipasi pasif, partisipasi moderat, observasi yang terstruktur dan tersamar, dan observasi yang lengkap.

- 2) **Observasi Terstruktur:** adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

Dalam penelitian ini ketiga jenis observasi di atas digunakan untuk mengungkap data tentang peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang. Secara filosofis teknik observasi dapat merekam data yang berkaitan perilaku atau tindakan yang berkaitan langsung dengan substansi yang penting dalam penelitian.

- c. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data (pelibatan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang, peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang) dan semua data yang diarsipkan berhubungan dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh melalui penelitian tentang peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang, dilaporkan adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data.

Bungin menyatakan analisis hasil penelitian hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.<sup>19</sup> Selanjutnya, data dianalisis secara taksonomis. Proses yang dilakukan menggunakan tiga tahapan Miles dan Huberman, yakni *reduction data*, Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, maka analisa datanya mengikuti teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Lexy Moleong analisis data kualitatif adalah upaya melakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi keArah Ragam Varian Kontemporer* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) hlm. 204.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm 245

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>21</sup>

Menurut Miles dan Huberman aktifitas analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Ada beberapa bentuk data kualitatif dari model Miles dan Huberman :<sup>22</sup>

*a. Data Reduction*

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting selanjutnya mencari tema dan polanya. proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

*b. Data Display*

*display* ialah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, *network* dan *chat*. Bila pola-pola yang ditemukan dan didukung oleh data selama penelitian. Maka, pola tersebut telah dianggap pola yang baku selanjutnya akan *didisplaykan* pada laporan akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* atau gambar.

---

<sup>21</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : P.T Remaja Rosda Karya, 2014), hlm 248

<sup>22</sup>Mathew B Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Diterjemakan Oleh Tjetjep Rohendi Rahidi*, (Jakarta : UI, 1992), hlm. 16-18.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Yaitu Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila terdapat bukti-bukti baru. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut kesimpulan yang kredibel. *conclusion* ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

- d. Triangulasi Data, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu lagi. Triangulasi ini merupakan suatu cara memandang permasalahan/objek yang akan dievaluasi dari berbagai sudut pandang, bisa dipandang dari banyaknya metode yang dipakai dari sumber data, tujuannya agar dapat melihat objek yang akan dievaluasi dari berbagai sisi, triangulasi dilakukan untuk mengejar atau mengetahui kualitas data yang dipertanggungjawabkan.

## **J. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini secara organis disusun ke dalam lima bab:

**BAB I:** Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Ulasan tentang landasan teor di antaranya Komite sekolah meliputi Pengertian Komite sekolah, landasan hukum Komite sekolah, Pembentukan Komite sekolah, tujuan pembentukan Komite sekolah, peran dan fungsi Komite sekolah, kedudukan dan sifat Komite sekolah, organisasi Komite sekolah.

**BAB III GAMBARAN UMUM MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1**

**PALEMBANG:** Isi Pembahasan, Sejarah MTs Negeri 1 Palembang, Letak Geografis, Visi, Misi, dan Tujuan, Struktur Organisasi Sekolah, Keadaan Guru dan Karyawan, Keadaan Anak Didik, Program Pendidikan Unggulan, dan Keadaan Saran dan Prasarana.

**BAB IV ANALISIS DATA PERAN KOMITE DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MTs NEGERI 1**

**PALEMBANG :** Isi Pembahasan, peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang dan dampak peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang.

**BAB V PENUTUP:** Isi Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi.